

PLPB : Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan  
 DOI : <http://doi.org/10.21009/PLPB.191.01>  
 DOI : 10.21009/PLPB

## STRATEGI PEREMPUAN DAYAK NGAJU DALAM PROGRAM REDD+ DI KALIMANTAN TENGAH

Nova Scorviana H.<sup>1</sup> dan Setiadi<sup>2</sup>

<sup>1</sup>*Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta  
 E-mail: nova.scorviana@unj.ac.id*

<sup>2</sup>*Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada  
 E-mail: setiadi\_antro@ugm.ac.id*

### Abstract

*The purpose of this research are to uncover and describing the role and strategy of Kalumpang women in DA-REDD+ program, that facilitated by KFCP. Ecofeminism approach used to finding Kalumpang women strategy, of looking at and treating nature. This approach is also intended to review the extent to which women's Kalumpang involvement in the DA-REDD+ KFCP. DA-REDD+ KFCP pilot project is one of the global framework related to climate change mitigation, saving the environment, by integrating the economics and sustainable prosperity through carbon stocks. The research was conducted in the Kalumpang village, Mantangai Kapuas District of Central Kalimantan Province, with an ethnographic approach. The data obtained by observation, participation observations, documentations, studies secondary data and in-depth interviews with informants who have been. The result showed that women are involved in a small part program, nursery and planting activities (reforestation), especially when filling the soil and planting seeds into polybags. While gender equality issues who was appointed by KFCP in the implementation of the program, has not been able to embrace all levels of society. Strategy undertaken by women Kalumpang also varies confront of the REDD+ program. There are so enthusiastic to follow each set of activities, some are then left and returned at the beginning of the activity.*

**Key words:** *Strategy of women, Dayak Ngaju, and REDD+ KFCP*

Volume XIX	Nomor 1	Maret 2018	e- ISSN : 2580-9199
------------	---------	------------	---------------------

## PENDAHULUAN

Masyarakat Kalumpang sebagai bagian dari etnis Dayak Ngaju memiliki kearifan lokal dalam melakukan aktivitas pertaniannya. Kearifan tersebut tertuang manakala mereka hendak membuka lahan yang akan dijadikan areal pertanian, maupun lahan yang sebelumnya sudah mengalami masa bera. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, salah satunya adalah upacara *mangariau*<sup>1</sup> dan *manyamburup*<sup>2</sup> sebagai bentuk permohonan ijin kepada penguasa lahan. Kemudian penentuan waktu dan dilanjutkan dengan menebas serta membakar lahan yang akan dijadikan kawasan pertanian dengan penerapan pola atau sistem sekat bakar. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran api saat proses pembakaran berlangsung. Salah satu gambaran Kalumpang jika sedang memasuki musim tanam, dapat disaksikan pada penggalan berikut:

“...toott...tootttt... mesin *alkun*<sup>3</sup> hilir-mudik hanya terdengar suaranya saja. Pagi itu tepian Sungai Kapuas tidak lagi terlihat, tertutup balutan asap tebal sisa pembakaran kemarin.

<sup>1</sup> Pembuka atau ungkapan permisi kepada penunggu lahan

<sup>2</sup> Merupakan upacara adat sebagai permintaan ijin kepada makhluk halus penunggu suatu kawasan (hutan) dengan pemberian sesajen tertentu. Tujuan upacara ini untuk kelancaran saat proses penanaman berlangsung.

<sup>3</sup> Alat transportasi sungai berupa perahu kecil yang dioperasikan menggunakan mesin.

Walaupun demikian, sebagian masyarakat yang sudah kontrak *ngupah* dan bayar *handep*<sup>4</sup> tetap harus pergi ke ladang untuk melaksanakan tugasnya. Seorang bapak berkata pada saya, “...Ya beginilah Mbak, cara orang *tuha*<sup>5</sup> kami dulu mengelola lahan pertanian, tebas, tebang, bakar, baru tanam. Hingga kini pun kami masih menjalankan warisan tersebut...”<sup>6</sup>

Deskripsi di atas menunjukkan bahwa tingkat polusi udara di Desa Kalumpang masih cukup tinggi, terlebih jika sudah memasuki musim kemarau dan periode pembakaran lahan untuk pertanian tiba. Hampir setiap hari asap tebal menyelimuti kawasan Desa Kalumpang. Kondisi ini telah menjadi sorotan banyak pihak, yang berakhir pada pengkambinghitaman kaum petani.

Perilaku petani Dayak Ngaju sebagaimana telah diulas secara singkat, kadang kala dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk kepentingan mereka. Tuduhan-tuduhan terkait kebakaran hutan selalu ditujukan kepada kaum tani Dayak Ngaju. Tanpa ditelusuri kembali siapa dalang sebenarnya dalam kebakaran hutan<sup>7</sup>. Hal ini membuat eksistensi petani

<sup>4</sup> Gotong royong, dalam hal pertukaran tenaga kerja.

<sup>5</sup> Tuha = tua (bahasa Banjar).

<sup>6</sup> Data harian 12 Oktober 2012

<sup>7</sup> Sebagian berpendapat bahwa terjadinya kebakaran hutan, akibat salah satu warga yang sedang mencari ikan membuang puntung rokok sembarangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh KFCP, ditemukan bahwa ada pihak lain (seperti perkebunan kelapa sawit) yang

Volume XIX	Nomor 1	Maret 2018	e- ISSN : 2580-9199
------------	---------	------------	---------------------

ladang termarginalkan sekaligus dilematis.

Di satu sisi, mereka harus menyambung tradisi leluhurnya dalam mengelola lahan yang sudah turun-temurun mereka kuasai, demi melanjutkan hidup. Pada sisi lain, apa yang dilakukan kaum tani Dayak Ngaju telah menyebabkan mereka menjadi korban kekerasan, dengan tidak didengar aspirasinya. Mereka dengan terang-terangan meminta pelatihan tentang sistem pengelolaan lahan tanpa dibakar<sup>8</sup>. Dalam upaya merubah tradisi tersebut, petani Dayak Ngaju mengalami permasalahan dengan pihak eksternal. Permasalahan yang dihadapi kaum tani tidak bisa lepas dari kegiatan mereka dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, perubahan tata guna lahan dan keterlibatan dalam proses industrialisasi yang dilakukan oleh pihak eksternal. Dalam konteks ini, aktivitas

---

menyebabkan terbakarnya lahan di samping faktor suhu udara. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah pun kini mulai kewalahan dalam memadamkan api yang tiba-tiba menjalar di sepanjang kawasan eks PLG (antara Palangkaraya-Pulang Pisau), berbagai bantuan datang dari lembaga-lembaga swasta dalam menanggapi masalah kebakaran yang kerap terjadi (seperti Satgas REDD+ dan KFCP melalui Tim *Fire Management*-nya), pihak desa pun mempunyai Kelompok Masyarakat Pengendali Kebakaran (KMPK) dan regu Pengendali Kebakaran (RPK).

<sup>8</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Gapoktan; Ketua Handel; dan Ketua TPK.

tersebut dapat dipandang memiliki kontribusi dalam memacu peningkatan pembuangan karbon. Pada lingkup yang lebih luas, akibat kegiatan ini, hutan dan gambut habis. Indonesia pun akhirnya turut menyumbang emisi karbon yang tidak sedikit. Hal inilah yang menyebabkan bumi tempat kita berpijak mengalami pemanasan di tiap penjurunya, bahkan telah membuat pola iklim dunia ikut berubah (UNDP, 2007: 3-4).

Meningkatnya temperatur global yang berakibat pada perubahan iklim, telah mengundang kesadaran publik akan pentingnya pengendalian faktor-faktor yang memicu pemanasan global. Hal ini mendorong terselenggaranya suatu konvensi tentang perubahan iklim pada tahun 2005 di Montreal. Konvensi ini menghasilkan kesepakatan tentang kewajiban pengurangan emisi. Keterlibatan Indonesia dimulai pada Rencana Aksi Bali tahun 2007 dan dilanjutkan dengan ikrar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada G 20 di Pittsburgh AS tahun 2009. Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 26 persen sampai 41 persen pada tahun 2020 dengan bantuan internasional (Cifor, 2012: 28). Selanjutnya pada Mei 2010 dibentuk Satuan Tugas REDD+, sebuah badan *ad*

<b>Volume XIX</b>	<b>Nomor 1</b>	<b>Maret 2018</b>	<b>e- ISSN : 2580-9199</b>
-------------------	----------------	-------------------	----------------------------

*hoc* yang melapor langsung kepada Presiden.

Menurut konvensi perubahan iklim di Montreal tahun 2005, semua negara mempunyai kontribusi terhadap pemanasan global, dengan perbandingan 20 persen bagi negara-negara berkembang dan 80 persen dari negara industri maju. Salah satu langkah yang dilakukan Indonesia adalah dengan turut serta dalam penyelenggaraan inisiatif REDD+. Pengintegrasian mekanisme REDD+ dalam strategi nasional merupakan salah satu tujuan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat miskin, khususnya skenario penciptaan lapangan kerja. Di samping itu, isu konservasi lahan hutan dimaksudkan untuk menciptakan pola pertumbuhan ekonomi berbasis strategi rendah karbon. Diterapkannya strategi ini, diharapkan bumi dan segala yang terdapat di dalamnya lestari (Zulkifli dalam Cifor, 2012: 29-32).

REDD+ merupakan skema global terkait aksi penyelamatan lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim. Inisiatif ini ditawarkan kepada negara-negara berkembang dalam menanggapi isu-isu terkait deforestasi dan degradasi hutan. Bagi negara-negara yang mampu melaksanakan dan melestarikan hutan

beserta cadangan karbonnya, akan diberi insentif melalui konversi karbon.

Istilah REDD+ mulai diperkenalkan dalam *Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice* (SBSTA) sesi 29 UNFCCC COP 14 di Poznan, Polandia pada Desember 2008<sup>9</sup>. Dalam implementasinya, inisiatif REDD+ ini masih menyimpan teka-teki terkait siapa saja yang berhak mendapat insentif tersebut, juga mengenai bagaimana mekanisme kerja yang seharusnya dilakukan oleh negara dalam pemerataan pengelolaan yang berbasis kesetaraan gender<sup>10</sup>.

Penyertaan perempuan dalam kebijakan REDD+ merupakan penawaran yang harus disambut baik oleh berbagai pihak. Akan tetapi, hal tersebut perlu dicermati ulang. Sebagaimana temuan Yanto Rochmayanto dan Pebriyanti Kurniasih (2013) bahwa perempuan turut menanggung dampak langsung dari adanya perubahan iklim, di mana mereka mengalami beban ganda karena harus

<sup>9</sup> Pada COP (*Conference of the Parties*) 14 di Poznan, strategi REDD+ bertambah di samping untuk mengatasi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (dua ketetapan awal REDD), juga sebagai peranan konservasi; pengelolaan hutan secara berkelanjutan; dan sebagai peningkatan cadangan karbon hutan.

<sup>10</sup> Menurut laporan penelitian Kebijakan Bank Dunia (2002), kesetaraan gender merupakan inti dari pembangunan, sebagai sebuah tujuan yang harus dicapai demi pembangunan itu sendiri.

Volume XIX	Nomor 1	Maret 2018	e- ISSN : 2580-9199
------------	---------	------------	---------------------

membantu sang suami dalam menghadapi perubahan pola produksi pertanian. Kaum perempuan pun harus menanggung ketidakadilan gender dalam proses adaptasi menghadapi perubahan suhu dan pola cuaca.

Bercermin dari beberapa kebijakan yang telah mengangkat isu gender, ditemukan bahwa keterlibatan perempuan hanya dijadikan “politik aktor” oleh pihak-pihak tertentu. Di samping itu, tujuan pengintegrasian perempuan, tidak memberikan pilihan dan suara sebenarnya dari harapan kaum perempuan (Fakih, 1996: 67). Dengan demikian, perempuan tetap menjadi objek dari kebijakan yang diciptakan. Hal ini mengindikasikan, bahwa pembangunan yang tengah berlangsung belum menyentuh semua aspek.

Beranjak dari apa yang dikemukakan Shiva (1997: 8), pembangunan yang terjadi saat ini merupakan pembangunan yang timpang. Dikatakan timpang, karena mengabaikan prinsip feminisme, pelestarian dan ekologi. Dalam pembangunan yang timpang, tercipta keterpecahan, di mana dominasi laki-laki atas alam dan perempuan masih menjadi pijakan yang masih kuat. Pada akhirnya, mengakibatkan kekerasan terhadap alam

dan kekerasan terhadap perempuan. Keterbelakangan perempuan akan meningkatkan penindasan atas mereka, dan terciptanya krisis ekologi dengan perusakan alam tanpa batas (1997: 6-7). Senada dengan yang diungkap Warren, hal ini mengindikasikan antara manusia dan alam masih terjerat kuat pada adanya suatu hubungan yang penting antara dominasi perempuan dan dominasi alam (Tong, 2010: 360).

Munculnya pernyataan bahwa perempuan diidentifikasi dengan alam, sementara laki-laki diasosiasikan dengan kebudayaan<sup>11</sup>, menunjukkan superioritas kebudayaan terhadap perempuan dan alam (Ortner via Moore, 1998: 31; Mies via Bhasin, 1996: 47). Lebih jauh lagi Shiva menegaskan bahwa rusaknya alam berkaitan dengan adanya paham androsentrisme, di mana budaya patriarkal masih memegang peranan sehingga eksploitasi dan dominasi terhadap perempuan dan alam masih cukup kuat.

Selama ini perempuan selalu berada di bawah kuasa laki-laki, begitupun yang menimpa alam. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pandangan Shiva (1997), yang menyebutkan bahwa alam begitupun

<sup>11</sup> Berasal dari teori besar, *nature* dan *nurture* (Budiman, 1982).

<b>Volume XIX</b>	<b>Nomor 1</b>	<b>Maret 2018</b>	<b>e- ISSN : 2580-9199</b>
-------------------	----------------	-------------------	----------------------------

perempuan telah terperangkap dalam hubungan dominasi patriarkal, di mana keduanya telah menjadi korban eksploitasi laki-laki. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menghadapi pembangunan yang timpang harus dihidupkan kembali apa yang disebut dengan prinsip feminin.

Lebih lanjut ditegaskan pula bahwa penyebab krisis lingkungan bukan sekedar disebabkan oleh cara pandang dan perilaku yang antropomorfisme, tapi justru secara androsentrisme (cara pandang dan perilaku yang mengutamakan dominasi, manipulasi, dan eksploitasi terhadap alam). Menyikapi hal tersebut, seharusnya perempuan turut serta dalam pembangunan dan mendapat kedudukan, peran dan akses yang sama dalam mengelola sumber daya. Pelibatan perempuan ini pun diharapkan dapat melepaskan perempuan dari perangkap sistem maskulin<sup>12</sup>, karena pada dasarnya antara perempuan dan laki-laki mempunyai peran masing-masing (Shiva dan Maria Mies, 2005). Tanpa kita sadari

bahwa selama ini kehadiran mereka mampu menjaga keseimbangan yang terjadi di dalamnya, begitupun halnya dalam program REDD+.

Perempuan mempunyai andil yang cukup besar dalam kelestarian hutan, ketahanan pangan, kelangsungan sumber daya hayati, dan berbagai aktivitas lainnya terkait hutan dengan kearifan lokal<sup>13</sup> yang dimiliki, sehingga hutan tetap lestari. Dilibatkannya perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemberian peran yang sama dalam menyelesaikan masalah lingkungan hidup, merupakan salah satu strategi bijaksana dalam pembangunan ini. Tidak hanya itu, pemberian pemahaman yang jelas tentang apa itu deforestasi dan degradasi hutan pada kaum perempuan, akan memperluas pengetahuan mereka tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Perempuan sekitar hutan tidak bisa dilepaskan dari aktivitas yang berhubungan dengan hutan. Baginya, hutan merupakan rumah kedua, “arena” tempat mencari dan menggali

<sup>12</sup> Salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam ekofeminisme adalah mengembalikan identifikasi perempuan dengan alam (Megawangi, 1999: 191), dalam istilah Shiva disebut “menghidupkan kembali prinsip feminin”. Karena selama ini sistem maskulin telah merusak dan menutupi nilai sakral kualitas feminin, kualitas feminin yang menurut standar maskulin dianggap rendah adalah baik bahkan superior menurut para ekofeminis.

<sup>13</sup> Lihat Shiva (1997), di mana perempuan India mampu menjaga kelangsungan keanekaragaman hayati dengan pemanfaatan hutan secara feminin (penggunaan pupuk hijau, memangkas pepohonan di bawah kendali “daur seni memotong” akan meningkatkan produktivitas hutan dalam kondisi stabil). Hal ini berarti perempuan mempunyai kearifan sendiri dalam menjaga hutan (terlepas dari ada/tidaknya inisiatif REDD+).

<b>Volume XIX</b>	<b>Nomor 1</b>	<b>Maret 2018</b>	<b>e- ISSN : 2580-9199</b>
-------------------	----------------	-------------------	----------------------------

pengetahuan pada sektor publik di samping sebagai “arena” untuk menambah penghasilan ekonomi rumah tangga. Hutan pun merupakan sarana ekspresi mereka, dapat dilihat bagaimana mereka berkreasi membuat suatu kerajinan yang bahan pokoknya berasal dari hasil hutan. Begitupun halnya dengan pengetahuan<sup>14</sup> tentang obat dan ramuan-ramuan tradisional. Hutan merupakan “pasar” bagi kaum ibu dalam memenuhi kebutuhan pangan seluruh keluarga<sup>15</sup>. Perempuan dan hutan sudah tidak bisa dipisahkan, ibaratnya hutan telah menjadi “belahan jiwa” bagi mereka.

Dengan munculnya REDD+ yang mengharap tidak ada lagi deforestasi dan degradasi hutan, hasil yang ingin dicapai dalam studi ini adalah sejauh mana para perempuan ikut terlibat dalam pengelolaan program tersebut, terutama yang difasilitasi oleh KFCP (*Kalimantan Forests Climate Partnership*) sebagai kepanjangan tangan dari *Demonstration Activities* REDD+ dengan menyertakan

<sup>14</sup> Pengetahuan di sini bukan hanya tentang obat-obatan saja sebagaimana tertuang di atas, melainkan banyak hal yang dapat diperoleh dari kehidupan hutan. Senada dengan pandangan Rabindranath tentang arti hutan bagi kehidupan masyarakat India, bahwa hutan merupakan tempat berteduh dan sumber makanan; keterkaitan antara manusia dan alam merupakan sumber ilmu pengetahuan (Shiva, 1997: 70-71).

<sup>15</sup> Dapat disaksikan dari aktivitas harian perempuan Kalumpang terkait keterlibatan mereka dalam pengelolaan sumber daya alam.

isu kesetaraan gender dalam rangkaian program kerjanya. Studi ini pun berusaha untuk melihat perubahan pranata perempuan terkait peran dan status perempuan, perempuan dengan alam serta relasi gender yang terjadi pasca deforestasi sampai munculnya program-program beralihkan penyelamatan lingkungan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran dan posisi perempuan Dayak Ngaju dalam REDD+, khususnya yang diselenggarakan oleh KFCP?; dan 2) Bagaimana strategi perempuan Dayak Ngaju dalam menghadapi program REDD+ yang difasilitasi KFCP?

Maksud tulisan ini ingin memaparkan keterkaitan antara alam, perempuan, dan berbagai produk budaya patriarki Barat lewat hegemoni negara (atas kontrol dan kebijakan yang diciptakan)<sup>16</sup>. Namun, ketika alam begitu pun perempuan tak sanggup lagi menahan beban yang diderita akibat proses pembangunan yang timpang, tentunya perjuangan kaum perempuan tidak akan berhenti sampai di sini. Banyak cara yang mereka siasati untuk mencoba keluar dari

<sup>16</sup> Termasuk program DA-REDD+ yang difasilitasi KFCP.

<b>Volume XIX</b>	<b>Nomor 1</b>	<b>Maret 2018</b>	<b>e- ISSN : 2580-9199</b>
-------------------	----------------	-------------------	----------------------------

jeruji hegemoni dan dominasi, meski sebagian dari mereka cukup asik menerima tanpa perlawanan.

Kajian ini menggunakan konsep gender dalam analisisnya dan pendekatan ekofeminisme. Kedua pendekatan tersebut dimaksudkan untuk melihat strategi perempuan Dayak Ngaju dalam menghadapi program pembangunan dan perubahan lingkungan yang dihadapi.

Pada skema yang dibangun, DA-REDD+ KFCP telah menyertakan isu gender dalam rangkaian kegiatan yang ditawarkan. Penyertaan kebijakan responsif gender pun tertuang dalam FPIC<sup>17</sup>, dengan tujuan agar semua jenis kelamin dapat terlibat dalam kegiatan KFCP. Hal ini berpedoman pada kebijakan afirmatif<sup>18</sup> dalam program pembangunan, guna keberhasilan pembangunan itu sendiri. Kebijakan

<sup>17</sup> *Free* (bebas tanpa paksaan), *Prior* (mendapatkan izin dari masyarakat), *Informed* (pemberian informasi yang luas dan seimbang), dan *Concern* (mendapatkan persetujuan dari masyarakat). Akan tetapi hak atas FPIC ini hanya berupa “tameng” yang digunakan KFCP. Hal ini karena seluruh rangkaian kerja yang ditawarkan oleh KFCP telah siap saji, sebelum mereka terjun pada masyarakat. Sehingga, masyarakat hanya tinggal melaksanakan kegiatan saja tanpa dilibatkan dalam proses perumusan/disain program. Hal ini bertentangan dengan konsep FPIC sendiri.

<sup>18</sup> Kebijakan yang bertujuan untuk menyebarluaskan akses pada pendidikan/pekerjaan bagi kelompok non-dominan, terutama perempuan. Hal ini untuk mengurangi efek diskriminasi dan untuk mendorong keterwakilan populasi dalam institusi publik.

tersebut memberikan kuota untuk keterlibatan perempuan sebesar 30%. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, hanya dengan melibatkan perempuan saja tidak cukup, dibutuhkan hal lain yang mendukung proses tersebut. Dengan demikian, penggunaan konsep gender dan pendekatan ekofeminisme dalam mengupas strategi perempuan Dayak Ngaju dalam program REDD+ diharapkan mampu memecah persoalan yang dihadapi. Berdasarkan pijakan tersebut, dapat diperoleh gambaran sebenarnya yang dibutuhkan oleh sasaran yang dituju. Sehingga proses pembangunan yang dijalankan, dapat menepi pada dermaga tujuan bersama, sesuai cita-cita kemajuan bangsa.

## METODOLOGI PENELITIAN

Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan dari bulan September 2012 hingga Desember 2012 pada masyarakat Dayak Ngaju yang tinggal di sepanjang daerah aliran Sungai Kapuas. Tepatnya di Desa Kalumpang Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi di mana peneliti terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat yang diteliti.

<b>Volume XIX</b>	<b>Nomor 1</b>	<b>Maret 2018</b>	<b>e- ISSN : 2580-9199</b>
-------------------	----------------	-------------------	----------------------------



Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, observasi partisipasi, studi data sekunder, wawancara mendalam, mencatat, merekam, menyimak, mengamati dan mengabadikan menggunakan kamera. Proses analisis data dilakukan sejak selama pengumpulan data berlangsung. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasi, dianalisis, diinterpretasi dan dideskripsikan secara terus menerus sesuai dengan topik, tema dan sub-sub tema dari permasalahan penelitian (Spradley, 2007: 132-133).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Masyarakat Kalumpang merupakan salah satu sub suku bangsa Dayak, tepatnya Dayak Ngaju<sup>19</sup> yang mendiami wilayah di tepian Sungai Kapuas Kalimantan Tengah. Pemukiman penduduk memanjang sepanjang aliran Sungai Kapuas terpusat di sebelah kanan, sedangkan areal di sebelah kiri Sungai Kapuas digunakan untuk pertanian penduduk.

Luas wilayah Kalumpang ±20.000 Ha<sup>2</sup>, terdiri dari pemukiman, kebun karet, ladang, dan lokasi penanaman kegiatan KFCP. Tanah milik yang bersertifikat 251

Ha, lahan pertanian 800 Ha, lahan perkebunan 600 Ha. Berdasarkan letak geografis, Desa Kalumpang berbatasan dengan Desa Katimpun di sebelah utara; sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mantangai Hulu; sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Jabiren Raya; dan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kapuas Murung (RPJM Desa Kalumpang, 2011).

Secara tipologi, jenis lahan yang terhampar di wilayah Kalumpang merupakan dataran dengan beberapa anak sungai (sei/saka) yang menghubungkan bagian sudut pemukiman warga. Selain di sebelah kiri Sungai Kapuas, areal pertanian (termasuk perkebunan) pun berada di belakang pemukiman warga. Termasuk kawasan kerja KFCP yang berada di Blok C 8, eks areal PLG<sup>20</sup>. Hamparan hutan belukar memanjang di setiap sudutnya.

<sup>19</sup> Ngaju, merupakan salah satu kelompok suku bangsa Dayak yang mendiami Pulau Kalimantan. Ngaju merupakan kelompok Dayak yang jumlahnya paling banyak dibanding kelompok lainnya di Kalimantan Tengah, (Melalatoa, 1995; Riwut, 2003)

<sup>20</sup> Mega Proyek Pengembangan Lahan Gambut Satu Juta Hektar, merupakan mega proyek nasional yang bermasalah karena tanpa didahului oleh kajian-kajian yang matang dan mendalam, sehingga menimbulkan masalah (<http://kalteng.go.id/INDO/Gambut.html> diakses 16 Maret 2017). Proyek tersebut gagal seiring dengan runtuhnya rejim Orde Baru (1999) dan disinyalir merupakan “legal logging terselubung”. Hamparan hutan, pemukiman, ladang dan kebun seketika berubah menjadi kawasan belukar karena terbakar, kebakaran hutan hebat terjadi rentang waktu 1997-2000 (<http://media.hariantabengan.com>, (diakses 13 Januari 2013).

<b>Volume XIX</b>	<b>Nomor 1</b>	<b>Maret 2018</b>	<b>e- ISSN : 2580-9199</b>
-------------------	----------------	-------------------	----------------------------

Masyarakat Kalumpang secara umum terdiri dari suku bangsa Dayak Ngaju sebagai penduduk asli daerah ini. Sedangkan suku bangsa pendatang seperti Banjar, Jawa, Sunda, dan dari suku-suku bangsa lain juga terdapat di Desa Kalumpang. Kondisi masyarakat yang beragam tersebut mengakibatkan agama yang dianut penduduk pun beragam, yaitu Islam, Protestan, dan Hindu Kaharingan<sup>21</sup> sebagai agama asli Dayak.

Bervariasinya agama yang dianut oleh setiap anggota keluarga dalam satu rumah, membuat keunikan tersendiri. Sekaligus menciptakan nuansa kehidupan keberagaman yang harmonis dengan toleransi cukup tinggi. Hal ini terbukti saat hari raya keagamaan, masing-masing pemeluk saling mengunjungi satu-sama lain. Islam, sebagai agama pertengahan yang dianut masyarakat Kalumpang pada awalnya merupakan agama pertama<sup>22</sup> yang masuk.

<sup>21</sup> Sebutan Kaharingan muncul dari kesadaran kepribadian kebudayaan Dayak untuk menghidupkan kembali kebudayaan mereka yang asli, mulai dipergunakan pasca Perang Dunia II (Danandjaja, 2007). Istilah Kaharingan sendiri diambil dari kata Danum Kaharingan yang artinya Air Kehidupan, di mana air tersebut mampu memberi hidup kepada manusia (Ukur dalam Danandjaja, 2007).

<sup>22</sup> Sekitar tahun 1540 Islam masuk ke lingkungan masyarakat Ngaju yang dibawa oleh pedagang Melayu Banjar, bercampur dengan bahasa Ngaju yang kemudian melahirkan dialek baru seperti pada bahasa orang Bakumpai/Mendawai,

Bahasa yang digunakan masyarakat Kalumpang (atau sebagian masyarakat yang tinggal di sepanjang Sungai Kapuas, terutama Kapuas bagian hulu dan tengah) ialah bahasa Kapuas atau bahasa Dayak Ngaju. Bahasa ini merupakan lingua franca suku bangsa Dayak yang ada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan (Andianto dalam Iper, dkk., 1997; Riwut, 2003; Avé dalam Danandjaja, 2007).

Seiring perjalanan jaman, dan terjadinya migrasi masuk ke desa ini, bahasa yang digunakan oleh masyarakat Kalumpang pun mengalami akulturasi dengan bahasa daerah asal para pendatang yang selanjutnya bermukim di sini (menjadi bahasa Banjar, bahasa Jawa dan bahasa Indonesia). Dalam komunikasi sehari-hari, penggunaan bahasa Banjar dan bahasa Kapuas lebih intens dilakukan oleh setiap anggota masyarakat, kecuali dalam menggunakan nama panggilan kekerabatan (kakek, nenek, paman, tante). Bisa dibedakan antara orang Dayak Ngaju asli (terutama yang beragama Kristen) dengan orang bukan asli Dayak/sudah ada percampuran (bagi orang Muslim) dalam penamaan kekerabatan akan tampak kentara, jika mereka memanggil nenek

(Melalatoa, 1995; Mallinckrodt 1928 via Riwut, 2003).

<b>Volume XIX</b>	<b>Nomor 1</b>	<b>Maret 2018</b>	<b>e- ISSN : 2580-9199</b>
-------------------	----------------	-------------------	----------------------------

atau kakek dengan sebutan “tambi” dan ”bue”, berarti mereka beragama Kristen dan asli Dayak. Namun jika mereka memanggilnya dengan sebutan “nini” dan ”kai”, berarti mereka merupakan orang pendatang yang suku bangsa asalnya Banjar dan beragama Islam, karena penyebutan seperti itu diambil dari bahasa Banjar.

Di samping bahasa Dayak Ngaju/bahasa Kapuas dan bahasa Banjar, masyarakat Kalumpang pun mengenal adanya bahasa Sangiang (bahasa Kuno). Akan tetapi orang yang mengetahui tentang bahasa ini sudah sangat terbatas, hanya para orang tua saja dan sebagian dukun kampung. Biasanya bahasa Sangiang, digunakan ketika acara-acara yang menyangkut ritual keagamaan (khususnya Kaharingan), atau ketika sang dukun mengobati (Melalatoa, 1995: 628). Perpindahan ke agama Kristen pada suku Dayak di Kalimantan, terjadi saat masa Kolonial Belanda melalui pendekatan adat (Lebar via Maunati, 2006: 84; Melalatoa, 1995: 629). Untuk mengatur dan menjalankan adat di Desa Kalumpang dikelola oleh tiga mantir adat yang mewakili dari tiga agama yang dianut di desa ini. Ketiga Mantir Adat tersebut adalah Mantir Adat Agama Islam, Mantir

Adat Agama Kristen dan Mantir Adat Agama Kaharingan.

### **A. Peran dan Posisi Perempuan Dayak Ngaju dalam DA REDD+ KFCP**

Kaum perempuan merupakan salah satu bagian yang mengisi berwarnanya nuansa Desa Kalumpang, dengan berbagai aktivitas yang mereka lakukan. Seiring dengan silih bergantinya program pembangunan yang masuk ke Desa Kalumpang, kaum perempuan turut andil dalam kegiatan-kegiatan yang ditawarkan. Sementara pekerjaan harian pun tetap mereka lakukan sebagaimana biasa. Meskipun demikian, tak sedikit perempuan Kalumpang merasa terusik dengan kehadiran program-program ini (terutama golongan perempuan yang masuk kriteria kaum marjinal).

Sebagian besar perempuan Kalumpang ikut terlibat dalam DA-REDD+ KFCP, sejak tahun 2009 (itupun hanya pada sebagian program saja). Bagi perempuan Kalumpang keberadaan program tersebut, seiring perjalanannya perlahan membentuk alur hingga terjalin rangkaian cerita. Dinamika di antara mereka pun tersaji. Hal ini dapat dilihat dari rangkaian strategi yang mereka lakukan dalam mengelola alam. Sebagaimana suatu masyarakat, terdiri dari beberapa lapisan dan golongan.

<b>Volume XIX</b>	<b>Nomor 1</b>	<b>Maret 2018</b>	<b>e- ISSN : 2580-9199</b>
-------------------	----------------	-------------------	----------------------------

Perempuan yang selama ini dianggap sebagai penguasa ranah domestik, perlahan mulai mengalami perubahan dan mendapat perhatian berbagai kalangan, termasuk para pembuat kebijakan. Adanya kebijakan afirmatif, merupakan salah satu strategi agar perempuan mampu berpartisipasi dalam segala bidang. Akan tetapi pada implementasinya, hal ini hanyalah strategi untuk melanggengkan budaya patriarki, di mana desain kebijakan yang diciptakan pada akhirnya semakin membuat sekat pada perempuan. Perempuan pun kembali lagi pada peran sebelumnya.

Sebelum kebijakan tersebut ada, akses bagi perempuan Dayak Ngaju dalam mengaktualisasikan diri pada sektor publik sudah sejak lama mendapat posisi yang cukup penting. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan mereka dalam mengelola sumber daya alam. Pandangan kaum laki-laki terhadap persamaan peran ini akibat telah melemahnya peraturan adat yang ada di desa Kalumpang, seperti yang diutarakan oleh beberapa tokoh masyarakat laki-laki.

“Dahulu, banyak sekali peraturan adat yang ada di sini, namun seiring perkembangan jaman, peraturan ini pun semakin berkurang, kalau dulu jika handak keluar desa masih susah, belum ada jalan darat. Dulu, perempuan tidak boleh keluar malam,

sekarang coba lihat di warung-warung”.

Dari pengutaraan di atas, dapat dilihat bahwa dengan adanya kemudahan akses darat, masyarakat baik perempuan maupun laki-laki dengan mudah bisa keluar-masuk kampung. Begitupun dengan adanya perempuan yang bekerja di luar rumah, atau saat ini misalnya akses yang diperoleh anak perempuan dengan anak laki-laki dalam hak pendidikan sama pentingnya. Begitupun dengan terlibatnya kaum perempuan dalam kegiatan KFCP.

Jika ditelisik lebih dalam, pengutaraan yang menyebutkan bahwa melemahnya peraturan adat telah berdampak pada bergesernya peran dan posisi perempuan Kalumpang. Pergeseran adat tersebut dapat kita saksikan secara langsung saat ada acara hiburan, seperti pesta kawinan, bahkan ketika ada yang meninggal pun kerap diwarnai perempuan-perempuan. Fenomena seperti ini, jika kita tarik ke belakang bermula sekitar tahun 1990-an hingga awal tahun 2000. Di mana saat itu, “pembangunanisme” bernama PLG perlahan mulai merubah pola pikir dan perilaku masyarakat Kalumpang.

Pintu perubahan masyarakat Kalumpang dari agraris menjadi proyekis, mulai terbuka seiring dengan masuknya Proyek Pengembangan Lahan Gambut

<b>Volume XIX</b>	<b>Nomor 1</b>	<b>Maret 2018</b>	<b>e- ISSN : 2580-9199</b>
-------------------	----------------	-------------------	----------------------------

Sejuta Hektar. Pembabatan hasil hutan secara sporadis pun terjadi. Alih-alih memperkuat swasembada beras lewat konversi lahan dan rawa gambut, proyek ini hanya menimbulkan kerusakan lingkungan dan pemiskinan. Meskipun yang terjadi saat itu perekonomian masyarakat langsung melejit tinggi. Akan tetapi kondisi seperti ini hanya dapat dirasakan dalam waktu singkat, selebihnya kerugianlah yang ditanggung banyak pihak, termasuk masyarakat sekitar hutan. Kerusakan ekosistem tidak dapat dihindari, keberadaan hutan sebagai penghasil biomass, cadangan air, sumber makanan tidak lagi dapat menjadi tumpuan masyarakat dan komunitas pertanian.

Kembali pada masa ketika keberlimpahan materi menjadi “anugerah” masyarakat Kalumpang, dengan adanya proyek tersebut terjadi migrasi masuk ke Desa Kalumpang. Orang-orang dari berbagai daerah (Jawa, Sulawesi, dan Banjar) berdatangan, bergabung untuk mencicipi berbagai rasa mudahnya meraup rupiah, dengan menjadi pekerja kayu. Berbagai perilaku pun berbaur saat itu, tak dapat disangkal kebiasaan baru yang dibawa oleh para pendatang perlahan merasuk dan menempel pada masyarakat Kalumpang. “Minum, judi

dan perempuan”, tiga kata yang saling berhubungan dan mempunyai kedudukan “penting” destruktif bagi para pekerja kayu, terutama bagi para migran yang nota bene jauh dari keluarga dan istri. Hadirnya hal-hal seperti ini memungkinkan terjadinya berbagai situasi yang bisa saja melemahkan posisi perempuan, bahkan bisa jadi para perempuan semakin gencar untuk membebaskan dirinya dari pengaruh kekuasaan musuh lamanya.

Keberlimpahan materi yang diperoleh cukup mudah, membuat masyarakat termasuk perempuan menjadi konsumtif. Saat masyarakat tenggelam dalam tumpukan rupiah hasil pembabatan hutan, prinsip ekonomi subsistensi sejenak lepas dan membuat mereka kalap. Hal ini didukung dengan peran pemerintah yang memberi akses untuk melancarkan aksinya “menebang pohon”, dengan pembuatan ribuan kanal sebagai jalur transportasi pendistribusian balok-balok kayu. Ketika jutaan pohon lenyap, alam pun berubah seketika. Masyarakat kehilangan mata pencaharian utama. Pada masa ini, perekonomian masyarakat Kalumpang terpuruk, perusahaan-perusahaan kayu milik masyarakat gulung tikar.

<b>Volume XIX</b>	<b>Nomor 1</b>	<b>Maret 2018</b>	<b>e- ISSN : 2580-9199</b>
-------------------	----------------	-------------------	----------------------------

Sekitar tiga tahun pasca ditutupnya akses masyarakat untuk menebang pohon, berbagai proyek beralihkan penyelamatan lingkungan berdatangan ke Desa Kalumpang. Lagi-lagi kehadiran proyek ini membangunkan masyarakat dari tidur lelapnya yang hampir pulang pada ekonomi subsisten, menjadi “bermata-duitan.” Hal ini berulang hingga KFCP masuk dan menjalankan program kerjanya.

Terdapat tiga program kerja yang ditawarkan KFCP untuk Desa Kalumpang. Program kerja tersebut di antaranya adalah kegiatan pembibitan dan penanaman (*reforestasi*), pengendalian kebakaran (*fire prevention*) dan pengembangan mata pencaharian alternatif (*livelihood*). Program kerja ini dapat terlaksana setelah melalui beberapa tahap dan kesepakatan antara pihak KFCP dengan Desa Kalumpang. Di samping itu, terdapat pula penawaran pelatihan yang ditujukan untuk pemerintah desa, TPK, TP dan kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan rencana kerja TPK.

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan reforestasi, terutama saat pengisian tanah dan penanaman benih ke *polybag*, memiliki persentase lebih banyak dibanding laki-laki. Begitupun saat pemeliharaan benih (seperti

penyiraman dan pemberian pupuk) di tempat persemaian. Hal ini karena wilayah kerja tersebut tidak jauh dari rumah, tempat kekuasaan kaum perempuan. Sementara kaum laki-laki lebih banyak terlibat saat pembuatan panggung, tempat persemaian kelompok. Tidak hanya itu, porsi pekerjaan yang diterima kaum laki-laki lebih beragam, seperti penanaman benih di lokasi yang telah ditentukan dan release. Meskipun dalam Perjanjian Desa tertuang bahwa penawaran pekerjaan ini terbuka untuk setiap jenis kelamin. Akan tetapi dalam implementasinya, paket pekerjaan yang ditawarkan tidak mampu dinikmati semua lapisan. Di sini terlihat bahwa kebijakan yang dibuat masih bernuansa dan mempertahankan pembagian kerja secara seksual. Dengan kata lain dapat diungkap bahwa, kebijakan tersebut abai terhadap kebutuhan perempuan yang ada di Desa Kalumpang.

Representasi dari adanya kebijakan responsif gender dalam penyelenggaraan program kerja KFCP, dapat dilihat dalam pemilihan TPK, TP, Petani Pemandu, dan Wakil Kelompok Marginal. Semua yang terlibat dalam kepengurusan ini telah mengikutsertakan perempuan, dengan perbandingan satu banding tiga. Akan tetapi hal ini pun tidak

Volume XIX	Nomor 1	Maret 2018	e- ISSN : 2580-9199
------------	---------	------------	---------------------

lepas dari faktor “kekuasaan” dan jaringan kekerabatan yang ada di Desa Kalumpang, sehingga peluang yang ada hanya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja.

Pada program *livelihood*, masyarakat terutama kaum marjinal dihadapkan pada persoalan yang membuat mereka tidak dapat menikmati bantuan, karena kendala tidak mempunyai lahan. Sebagian masyarakat yang tidak mempunyai lahan tersebut adalah kaum pendatang. Menurut kriteria kelompok marjinal yang dibentuk KFCP, kelompok ini masuk dalam kelompok marjinal, di samping empat kriteria lainnya (perempuan, janda, masyarakat terpinggirkan, dan difabel). Saat berlangsung musdes yang ketiga, dilakukan diskusi dan pencarian solusi bagi kaum marjinal agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan *livehood*. Akan tetapi, hingga penghujung November 2012 masalah ini belum dapat dipecahkan. Dengan demikian, bercermin dari peristiwa tersebut, pembentukan kelompok marjinal yang dilakukan di bawah program *livelihood* tidak mampu memecah persoalan yang ada. Kelompok marjinal semakin tersisihkan, seperti yang terjadi pada beberapa warga, salah satunya Mama Pipit.

“...Mau nanam *pake* apa, *ga* punya *ces*, *klotok ga* punya juga. Di RT ini, yang *ga* punya lahan *tuh* ada 6 KK termasuk saya dan Mama Nias. Katanya pembakal akan dikasih pinjam tanah desa, tapi lokasinya jauh di C 8 sana. *Tahu tuh...*”

Hal senada diutarakan oleh Indu Lani, “...Tenaga tidak ada lagi, bagaimana mau nanam? Belum lagi harus *nebas* dan menuju kebun itu harus menggunakan *ces...*”. Sebagai seorang janda dengan usia yang sudah senja, Indu Lani pesimis untuk bisa terlibat dan mendapat bantuan paket karet. Berdasarkan pengungkapan di atas, kaum perempuan, janda dan kelompok marjinal lainnya semakin tersisihkan dalam program *livelihood*. Kendala lahan, tenaga kerja, dan alat transportasi membuat mereka tidak bisa mencicipi bantuan yang diberikan oleh KFCP. Alternatif penawaran pekerjaan lain pun tidak bisa mereka peroleh, sebagaimana janji yang mereka tawarkan pada awal musdes program ini.

Beberapa gambaran di atas baru sekilas saja tentang perempuan dan KFCP. Seperti warga Kalumpang lainnya, para perempuan pun diberi akses yang sama untuk turut berperan serta dalam semua kegiatan yang disediakan KFCP. Akan tetapi, dari semua program kegiatan yang ditawarkan (*reforestasi, fire management, realese, dan livelihood*) para perempuan Kalumpang hanya mampu mengikuti program reforestrasi saja. Dalam kegiatan *livelihood* peruntukkannya hanya bagi mereka yang mempunyai lahan, itu pun tidak menyentuh seluruh kalangan perempuan. Perempuan yang

Volume XIX	Nomor 1	Maret 2018	e- ISSN : 2580-9199
------------	---------	------------	---------------------

sudah tua, atau perempuan kepala rumah tangga tidak bisa ikut terlibat dalam kegiatan *livelihood* karena kendala tenaga kerja dan alat transportasi, meski mereka sendiri mempunyai lahan kosong. Pembentukan kaum marjinal pada akhirnya hanya sekedar asal ada wakil masyarakat, laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana pada pengutaraan sebelumnya, selain perempuan mengikuti kegiatan reforestrasi, mereka pun berebut untuk berperan dalam pengelolaan konsumsi manakala diadakan pertemuan antara masyarakat dengan KFCP. Hal ini muncul karena adanya distribusi pekerjaan yang tidak lancar, di samping itu karena *mindset* masyarakat yang telah terbawa dengan “uang, dan uang”, alias “mata duitan”. Perempuan tidak bisa disalahkan dalam hal ini, karena sesuatu itu muncul jika ada pemicunya, yakni “uang”. Reaksi seperti ini seperti diketahui warga, alasan utamanya karena adanya kecemburuan antar warga perempuan terhadap warga perempuan lainnya saat mereka mendapat order konsumsi. Distribusi pekerjaan ini tidak terbuka untuk semua perempuan Kalumpang, akhirnya mereka menuntut keadilan agar memperoleh bagian seperti perempuan lainnya.

## **B. Strategi Perempuan Dayak Ngaju Menghadapi Program REDD+**

Dari dahulu perempuan Kalumpang sudah terbiasa dengan aktivitas pada sektor publik, terutama kegiatan dalam pengelolaan sumber daya alam. Kehadiran program DA-REDD+ bagi sebagian perempuan Kalumpang, hanya dipandang sebelah mata. Artinya, tanpa mereka ikut terlibat dalam kegiatan yang diselenggarakan KFCP, mereka masih bisa menjaga alam. Hal seperti ini muncul dari kaum perempuan yang menghabiskan hari-harinya di hutan (kebun dan ladang), tanpa harus menjadi “buruh KFCP”. Golongan perempuan seperti ini, ada dua jenis kepentingan. Pertama, karena suaranya tidak didengar dan tidak diperhitungkan dalam masyarakat (kaum marjinal); kedua, karena mereka sadar betul bahwa menjaga alam adalah kewajiban mereka sebagai makhluk Tuhan, tanpa harus ada lembaga yang mengatur. Golongan perempuan kedua ini, patut kita apresiasi. Tanpa kehadiran KFCP pun, golongan perempuan ini sudah turut andil dalam program REDD.

Kaum perempuan Kalumpang dari berbagai lapisan, memperlihatkan strategi masing-masing saat program REDD+ yang dilaksanakan oleh KFCP hadir

<b>Volume XIX</b>	<b>Nomor 1</b>	<b>Maret 2018</b>	<b>e- ISSN : 2580-9199</b>
-------------------	----------------	-------------------	----------------------------



dalam kehidupan mereka. Bagi perempuan yang terbiasa aktif dalam lembaga-lembaga yang ada di Desa Kalumpang, mengambil bagian untuk terlibat dalam kepengurusan lembaga. Sebagian lainnya, ada yang mengambil jatah untuk tidak ketinggalan dalam kegiatan yang masih berhubungan dengan pekerjaan reproduksi (menjadi pengelola konsumsi dalam pertemuan desa). Ada juga yang cukup *anteng* mengisi hari-harinya seperti sedia kala, dengan rangkaian aktivitas yang biasa mereka lakukan (aktivitas sebelum adanya KFCP), tanpa ikut terlibat dalam program kerja yang ditawarkan.

Bagi sebagian kelompok perempuan lain, kehadiran KFCP merupakan arena untuk memperluas jaringan dan wawasan. Kelompok seperti ini dapat kita jumpai pada perempuan yang tidak terlibat dalam kegiatan mengelola alam<sup>23</sup>. Sehingga strategi yang mereka lakukan dalam program DA-REDD+, adalah dengan aktif terlibat pada setiap pertemuan. Ada juga kelompok perempuan yang hanya sekedar ikut-ikutan saja, tanpa tahu arah dan tujuan

dari kegiatan yang mereka ikuti. Hal ini didukung oleh faktor ekonomi, sehingga setiap ada penawaran bantuan, akan langsung mereka terima. Penerimaan yang mereka lakukan tidak disertai dengan pikiran jauh ke depan, yang penting ada uang. Sekelompok perempuan lain hanya bisa pasrah, saat tidak mendapat izin sang suami untuk ikut terlibat dalam program kegiatan DA-REDD+ KFCP. Namun, ada juga perempuan yang bersikeras untuk tetap ikut meski sang suami tidak mengizinkan. Seperti pengutaraan berikut.

“...Yang banyak ikutan tuh RT 3, kebanyakan oleh suaminya *tuh ga* boleh, mereka terpaksa nurut meskipun mereka mau. Tapi kalau aku *ga gitu* Mbak, sekiranya aku mampu, ya aku ikut *ja*. Jika aku *ga* mampu, aku upah *ja*. Seperti pembibitan tahap II, waktu nyari tanah aku *ngupah*, yang ngisi ke *polybagnya* baru aku. Yang penting kita bisa bertanggung jawab, mana ada Papa Diya ikut. Semuanya aku *ja* yang mengisi tanah ke *polybag*. Sekira aku mampu, tidak membebankan orang, aku ikut daripada aku diam di rumah. Kebanyakan orang gitu, kalau *ga* boleh sama suami mereka akhirnya *ga* ikut.”

Dari pengutaraan di atas, dapat dikatakan bahwa masuknya KFCP ke Desa Kalumpang telah menimbulkan berbagai persoalan dan perubahan yang dialami masyarakat, termasuk perempuan. Kehadiran KFCP telah mengusik kehidupan masyarakat, lewat skema yang

<sup>23</sup> Salah satunya, Indu B (35 tahun). Karena ia tidak suka dan tidak terbiasa pada kegiatan yang berhubungan dengan merawat alam, jalan yang ia tempuh adalah dengan aktif berpartisipasi pada kegiatan kelembagaan saja.

<b>Volume XIX</b>	<b>Nomor 1</b>	<b>Maret 2018</b>	<b>e- ISSN : 2580-9199</b>
-------------------	----------------	-------------------	----------------------------

tidak sepenuhnya dapat dipahami mereka. Seperti konsep FPIC yang tidak dilaksanakan dengan semestinya oleh KFCP, telah menimbulkan respon yang dapat dikatakan “semaunya saja” dari masyarakat. Setelah masyarakat dan perempuan menjadi materialistis dan proyekis, kehadiran berbagai program yang masuk ke Desa Kalumpang cukup dinanti, sekaligus menjadi arena mereka untuk meraup keuntungan semata. Hal ini dengan pertimbangan bahwa mereka masih punya alam untuk mereka kelola, alam yang mampu menopang kelangsungan hidup mereka. Benturan yang terjadi antara masyarakat dengan KFCP acap kali terjadi (hal ini akibat KFCP tidak konsisten mengikuti kalender musim yang berlaku). Pada akhirnya, masyarakat pun perempuan dengan mudah mengurungkan niatnya untuk tidak turut serta, dan lebih memilih untuk mengelola lahan miliknya.

Perempuan Kalumpang dapat dikatakan cukup berkontribusi dalam kegiatan yang diadakan oleh KFCP. Akan tetapi mereka hanya mampu dilibatkan dalam lingkup yang begitu kecil, yakni hanya dalam kegiatan pembibitan. Di satu sisi mereka harus terus menjaga alam, akan tetapi di sisi lainnya saat berdatangan program, mereka pun ingin

terlibat dalam program kerja yang ditawarkan. Timbulnya dua keinginan ini membuat perempuan Kalumpang harus berstrategi, strategi untuk tetap melaksanakan aktivitas hariannya menjaga alam demi kelangsungan hidup, juga strategi agar mereka dapat terlibat dalam program DA-REDD+ KFCP.

Gambaran kasus yang terjadi pada perempuan Kalumpang terkait aktivitas mereka pada sektor publik (mengelola alam dan ekonomi subsisten), telah melahirkan berbagai produk perilaku masyarakat Kalumpang. Seperti strategi yang dilakukan Kana, menunjukkan bentuk strategi perempuan yang begitu antusias terhadap program. Strategi seperti ini lebih fokus pada kegiatan sosial kelembagaan, di luar aktivitas mengelola alam. Namun, dari ulasan sebelumnya strategi yang dilakukan Kana tidak hanya berkuat pada masalah kelembagaan saja. Meskipun dia tidak menyukai pekerjaan berat, akan tetapi saat mengikuti program pembibitan, ia justru bekerja mati-matian mengurus bibit. Kana pun rajin memantau ke lokasi penanaman, asalkan ada “uang lelah”. Hadirnya strategi seperti ini, dilatarbelakangi oleh berbagai hal salah satunya karena kebutuhan akan pengetahuan dan jaringan, di samping kebutuhan ekonomi.

<b>Volume XIX</b>	<b>Nomor 1</b>	<b>Maret 2018</b>	<b>e- ISSN : 2580-9199</b>
-------------------	----------------	-------------------	----------------------------

Bentuk strategi lainnya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Mama Simi, merupakan strategi yang setengah menghindari program, dan menghindari program. Pada awalnya ia berusaha untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang ditawarkan. Karena mendapat perlakuan tidak adil, ia pun menjauh dari program. Akan tetapi, tanpa ia mengikuti DA-REDD+ KFCP ia sudah berkontribusi dalam menjaga lingkungan, sebagaimana tujuan KFCP. Bentuk strategi lainnya adalah strategi yang menerima program, seperti strategi yang dilakukan Mama Yaya. Berbeda halnya dengan yang dilakukan Mama Onne, ketika ada program pembibitan ia sekedar mengikuti, dan *cukup* anteng melakukan aktivitas hariannya. Akan tetapi tanpa ia berstrategi lebih, ternyata pembawa program yang membutuhkan perannya, terutama ketika proses penanaman dilakukan. Strategi-strategi yang dilakukan perempuan Kalumpang, merupakan wujud aktualisasi dan representasi perempuan Kalumpang dalam program DA-REDD+ KFCP.

Munculnya strategi yang dilakukan perempuan Kalumpang didasari oleh adanya persamaan tujuan yang ingin mereka capai, yaitu untuk mendapat persamaan atas akses dan kontrol terhadap alam, juga untuk mempertahankan

hubungan antara mereka dengan alam. Hal ini mereka lakukan karena mereka mempunyai keterikatan luar biasa terhadap alam. Bagi mereka alam merupakan rumah kedua, “arena” tempat mencari dan menggali pengetahuan pada sektor publik di samping sebagai “arena” untuk menambah penghasilan ekonomi rumah tangga. Alam pun merupakan sarana ekspresi mereka. Hutan merupakan “pasar” bagi kaum ibu dalam memenuhi kebutuhan pangan seluruh keluarga (pemenuhan akan sayur-mayur, umbi-umbian dan buah-buahan, tentunya sebagai pemenuhan akan kebutuhan makanan pokok)<sup>24</sup>.

## KESIMPULAN

KFCP sebagai lembaga lokal di Kalimantan Tengah yang menjalankan DA-REDD+ di bawah naungan IAFCP, telah membawa masyarakat juga perempuan pada perubahan masyarakat yang cenderung menjadi “materialis”. Adanya isu responsif gender yang diusung dalam program kerja KFCP, hanya mampu melibatkan perempuan pada sebagian kecil sektor, yaitu kegiatan pembibitan dan penanaman (*reforestasi*), terutama saat pengisian tanah dan penanaman benih ke *polybag* meski jika

<sup>24</sup> Dapat disaksikan dari aktivitas harian perempuan Kalumpang terkait keterlibatan mereka dalam pengelolaan sumber daya alam.

Volume XIX	Nomor 1	Maret 2018	e- ISSN : 2580-9199
------------	---------	------------	---------------------

dilihat dari jumlahnya lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Begitupun saat pemeliharaan benih (seperti penyiraman dan pemberian pupuk) di tempat persemaian. Sementara kaum laki-laki lebih banyak terlibat saat pembuatan panggung, tempat persemaian kelompok. Tidak hanya itu, porsi pekerjaan yang diterima kaum laki-laki lebih beragam, seperti penanaman benih di lokasi yang telah ditentukan dan release.

Akses yang terbatas, berdampak pada tidak samanya kesempatan memperoleh bantuan dari program yang ditawarkan, baik bagi perempuan maupun bagi masyarakat kalangan tertentu. Pembentukan kelompok marginal pada program yang ditawarkan, belum mampu mengangkat dan melibatkan keberadaan mereka secara nyata. Berbagai strategi muncul dari perempuan Kalumpang dengan caranya masing-masing, ada yang terus memburu bahkan ada yang pergi begitu saja. Di penghujung program, perempuan Kalumpang kembali pada peran dan posisi awal mereka. Tanpa program REDD+ pun, perempuan Kalumpang yang sudah terbiasa bergelut dengan alam, mampu merawat dan menjaga alam tempat mereka bernaung.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Dr. Pujo Semedi Hargoyuwono, M. A., Dr. Setiadi, M. Si., Dr. Anna Marie Wattie, M. A. (almh.) atas saran dan masukan yang telah diberikan. Tentunya terima kasih penulis haturkan kepada Kedubes Norwegia dan MAP UGM atas beasiswa dan ilmu yang diberikan pada berlangsungnya penelitian ini.

Terakhir terima kasih yang tak terhingga untuk masyarakat Kalumpang (para Mama, Perangkat Desa Kalumpang, Para Mantir Adat), Satgas REDD+ Kalimantan Tengah, Walhi Kalimantan Tengah, KFCP, YPD, LDP, PNPM-MP Kabupaten Kapuas terutama Kecamatan Mantangai, Damang Mantangai, yang telah memberikan ruang sehingga penelitian ini berjalan dengan lancar, dan artikel dapat dipublikasikan ke Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan (PLPB) UNJ.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bhasin, Kamla. 1996. *Menggugat Patriarki, Pengantar tentang Persoalan Dominasi terhadap Kaum Perempuan*, terjemahan Nug Katjasungkana. Yogyakarta: Bentang.
- CIFOR. 2010. *REDD: Apakah itu? Pedoman CIFOR tentang Hutan, Perubahan Iklim dan REDD*. Bogor: CIFOR.

Volume XIX	Nomor 1	Maret 2018	e- ISSN : 2580-9199
------------	---------	------------	---------------------

- , 2012. *CIFOR dan Indonesia. Kemitraan untuk Hutan dan Masyarakat*. Bogor: CIFOR.
- Danandjaja, James. 2007. "Kebudayaan Penduduk Kalimantan Tengah", dalam *Koentjaraningrat Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Fakih, Mansour. 1995. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 2011 *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press bekerjasama dengan Pustaka Pelajar.
- KFCP dan Desa Kalumpang. 2011. "Perjanjian Desa Antara Kalimantan Forests Climate Partnership (KFCP) dan Desa Kalumpang".
- , 2012. "Laporan Akhir Baseline Sosio-Ekonomi KFCP".
- Moore, Henrietta. 1998. *Feminisme dan Antropologi*, terjemahan Tim Proyek Studi Gender dan Pembangunan FISIP UI. Jakarta: Obor.
- Riwut, Tjilik. 2003. *Maneser Panatau Tatu Hiang, Menyelami Kekayaan Leluhur*. Palangkaraya. Pusakalima.
- , 2007. *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*. Yogyakarta: NR Publishing.
- RPJM Desa Kalumpang. 2011. Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Rochmayanto, Yanto dan Pebriyanti Kurniasih. 2013. Peranan Gender dalam Adaptasi Perubahan Iklim Pada Ekosistem Pegunungan di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. *Analisis Kebijakan Kehutanan*, 10, (3), 203-213, ([http://fordamof.org/files/Analisis\\_Kebijakan\\_1\\_0.3.2013-2.\\_Yanto\\_Rochmayanto.pdf](http://fordamof.org/files/Analisis_Kebijakan_1_0.3.2013-2._Yanto_Rochmayanto.pdf))
- Sadli, Saporinah & Soemarti Patmonodewo. 1995. "Identitas Gender dan Peranan Gender" dalam *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, penyunting Ihromi. Jakarta: Yayasan Obor.
- Satgas REDD+. 2012. *Strategi Nasional REDD+*. Jakarta: Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ Indonesia.
- Schärer, Hans. 1963. *Ngaju Religion, The Conception of God Among a South Borneo People*, translated by Rodney Needham. Netherlands: The Netherlands Institute for International Cultural Relations.
- Shiva, Vandana dan Maria Mies. 2005. *Ecofeminism, Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan*. Yogyakarta: Ire Press.
- Shiva, Vandana. 1995. *Bebas dari Pembangunan, Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India*, terjemahan Hira Jhamtani. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KONPHALINDO.
- Spradley, J.P. 2007. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sugihastuti, dan Itsna Hadi Saptiawan. 2007. *Gender dan Inferioritas Perempuan: Praktik Kritik Sastra Feminis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tong, Rosemarie Putnam. 2010. *Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif Kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*, Terj. Aquarini Priyatna Prabasmoro. Yogyakarta: Jalasutra.
- UNDP. 2007. *Sisi Lain Perubahan Iklim*, "Mengapa Indonesia Harus Beradaptasi Untuk Melindungi Rakyat Miskinnya"

Volume XIX	Nomor 1	Maret 2018	e- ISSN : 2580-9199
------------	---------	------------	---------------------